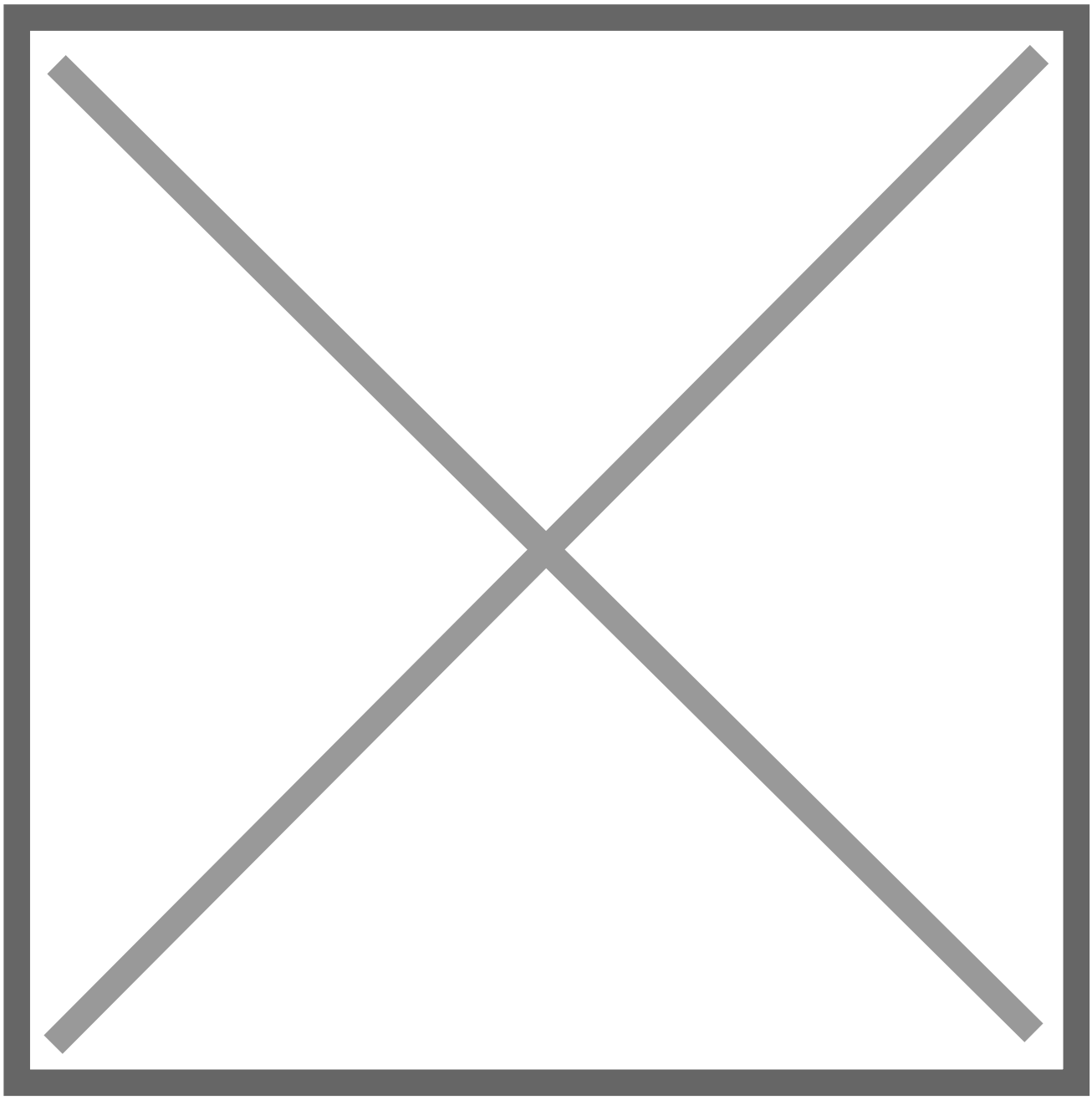
SIARAN PERS



Tingkatkan Transparansi, Subholding Pelindo Perluas Standardisasi dan Digitalisasi

Admin -- 21 August 2023

Jakarta, 19 Agustus 2023 - PT Pelindo Solusi Logistik/ SPSL sebagai Subholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/ Pelindo, terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima serta bebas dari tindakan curang, korupsi, dan pemerasan.

Pasca penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), SPSL telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi salah satunya dengan melakukan standardisasi dan digitalisasi pada layanan logistik maupun *hinterland development*.

“Kami mendorong langkah-langkah perbaikan, yang paling utama adalah transformasi dan transparansi di semua lini bisnis logistik. Kami akan terus melakukan upaya untuk mewujudkan ekosistem logistik nasional yang lebih tertata, transparan, dan bersih dari tindakan korupsi,” kata Direktur Utama SPSL, Joko Noerhudha.

Standardisasi dan digitalisasi tengah gencar diimplementasikan secara bertahap di lebih dari 40 area layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk yang pertama SPSL telah melakukan transformasi operasi di lapangan *Cargo Consolidation and Distribution Center* (CCDC) 100 di Makassar yang dikelola oleh PT Multi Terminal Indonesia yang merupakan salah satu anak usaha SPSL, dengan melakukan re-layout lapangan, pengimplementasian sistem operasi dan billing system. Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah Standardisasi Operasi Logistik di Lapangan Pasoso dan Gudang CDC Banda yang juga dikelola oleh PT Multi Terminal Indonesia serta Depo Belawan yang dikelola oleh PT Prima Indonesia Logistik, yang juga adalah anak usaha SPSL di bidang logistik.

“Fokus kami adalah menerapkan Standardisasi Operasi Logistik di seluruh area layanan. Satu contoh, sebelum dilakukan transformasi operasi, lapangan CCDC 100 Makassar belum memiliki sistemisasi di lapangan, pencatatan dan monitoring masih manual, serta penataan dan pengoperasian yang belum terstandardisasi. Keadaan seperti ini dikhawatirkan menjadi celah masuknya peluang tindakan curang, korupsi, dan pemerasan,” ujar Joko Noerhudha.

Bentuk keseriusan perusahaan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi, dan pemerasan dilakukan juga melalui berbagai cara seperti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* Perusahaan. Selain itu juga dilakukan pembentukan tim FKAP (Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan) oleh Direksi untuk memastikan penerapan SMAP sesuai dengan persyaratan, dan melaporkan pelaksanaan kinerja SMAP kepada Dewan Pengarah dalam hal ini Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Upaya penting lain yang juga dilakukan perusahaan adalah melakukan integrasi SMAP dengan *knowledge management* melalui pemberian pelatihan *Awareness* SMAP SNI ISO 37001:2016 kepada para pekerja. Tidak hanya itu, SPSL juga rutin melakukan sosialisasi dan publikasi terkait larangan atau himbauan *No Bribery, No Kickback, No Gift & No Luxurious Hospitality* pada hari-hari besar keagamaan, *awareness* terhadap kejadian pelanggaran, dan penandatanganan pakta integritas anti penyuapan oleh semua pekerja baik di lingkungan Perusahaan, Anak Perusahaan dan Perusahaan terafiliasi. Guna memastikan efektivitas SMAP dilakukan Audit SMAP SNI ISO 37001:2016 secara berkala dengan melibatkan badan sertifikasi berkelas internasional.

Sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh stakeholder kepelabuhanan, pada acara Forum Konsolidasi “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi” yang diinisiasi oleh Pelindo bertempat di Ritz-Carlton, Jakarta pada 15 Agustus 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan, Mahfud MD menekankan kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi merupakan bagian proses hilir, sedangkan dalam proses hulu terletak dalam upaya pencegahan yang membutuhkan komitmen kita semua termasuk komitmen bersama masyarakat pelabuhan dalam memberantas praktik korupsi.

“Persoalan korupsi menjadi aspek yang diperhatikan dalam pembenahan layanan di pelabuhan, tidak hanya cukup penindakan, namun juga memerlukan perbaikan sistem dan pencegahan, merupakan angka yang harus dikedepankan dalam perbaikan tersebut. Digitalisasi sektor pelabuhan, merupakan langkah yang penting yang harus segera dilakukan karena akan membuat sistem tata kelola lebih transparan. Tidak hanya pada pengangkutan di pelabuhan namun juga pada proses distribusi hingga bea cukai,” ujar Mahfud.

“Sejalan dengan itu, SPSL sebagai bagian dari Pelindo Group senantiasa berkomitmen untuk menempatkan aspek-aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi perusahaan di bidang Logistik dan *Hinterland Development*. Kami mengajak kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, jika melihat atau mencurigai terjadinya pelanggaran di lingkungan SPSL atau Pelindo Group, jangan ragu untuk melaporkan melalui kanal pengaduan Pelindo Group yakni Pelindo Bersih (https://pelindobersih.whistleblowing.link/,),” tutup Joko Noerhudha.